



KAPUAS HULU!
SEMAKIN HEBAT!

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029



DISKOM
INFOTIK

KABUPATEN KAPUAS HULU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah- Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 - 2029 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2025 - 2029, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 - 2029 mengacu kepada visi dan misi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yaitu **Kapuas Hulu Semakin Hebat**” (Semakin Harmonis, Semakin Enejik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil”. Visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai landasan dasar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam menentukan langkah strategis dalam mengelola bidang urusan komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik yang terkait dengan Misi ke 4 (Empat) yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas”*.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, sangat dimungkinkan terjadinya pengayaan terhadap berbagai program strategis sesuai dengan kondisi eksisting serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengayaan tersebut menjadi bagian dari upaya afiliasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Orientasi utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik yang terbuka, transparan, dan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan. Pendekatan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

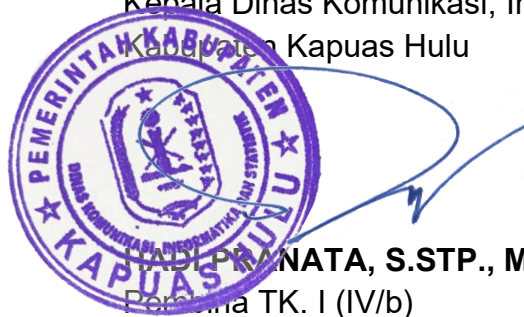
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan agility (kelincahan) dan responsibility (tanggung jawab) dari sumber daya manusia maupun organisasi. Hal ini menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kapasitas dan kualitas layanan publik berbasis digital.

Melalui penguatan tata kelola digital dan peningkatan kompetensi aparatur, diharapkan terwujud pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan inovatif menuju “Kapas Hulu Semakin Hebat”.

Putussibau 25 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Kapuas Hulu



YADI PRANATA, S.STP., M.Si

Perencana TK. I (IV/b)

NIP. 19650507 199803 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFOTIK	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	27
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	29
2.5. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	332
2.6. Penetapan Isu-Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Tujuan Dan Sasaran.....	34
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DISKOMINFOTIK	40
4.1. Prograam, Kegiatan Sub Kegiatan	40
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Gambar Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	5
2.1. Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	18

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pegawai Menurut Jabatan	19
Tabel 2.2. Aparatur Diskominfo Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 2.3. Aparatur Diskominfo Berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Diskominfo.....	21
Tabel 2.5. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2021-2024 Diskominfo	27
Tabel 2.6. Peluang dan Tantangan Diskominfo	29
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo	35
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dskominfo	38
Tabel 3.3. Strategi Diskominfo	39
Tabel 4.1. Program Prioritas Diskominfo.....	44
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo	47
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Diskominfo	48
Tabel 4.4. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Diskominfo	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi melalui kerjasama dan kemitraan bersama komunitas komunikasi berbasis potensi lokal, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan akses Informasi, Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan kuantitas dan kualitas data Statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik.

Bedasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu termasuk dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang keempat yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas.

1.1.1 Pengertian Renstra

Rencana Strategis yang kemudian disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misivisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok suatu organisasi, dengan jangka waktu lima tahun. Renstra

berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Renstra menjadi acuan dalam menentukan arah dan langkah suatu organisasi untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang serta digunakan sebagai alat manajemen untuk mengelola sumber daya modal dan sumber daya manusia seperti karyawan dan pemangku kepentingan agar bekerja menuju tujuan bersama, menetapkan kesepakatan mencapai hasil yang diinginkan serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan.

Renstra merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan atau OPD. Dalam rencana strategis tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disertai dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen resmi yang berisikan rencana strategis 5 (lima) tahun, sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja (renja) OPD dan sebagai acuan bagi stakeholder di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “*Terwujudnya*

Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT” (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil”.

Dalam Visi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 – 2029, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mendukung pada Misi 4 (empat) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 - 2029 yang menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

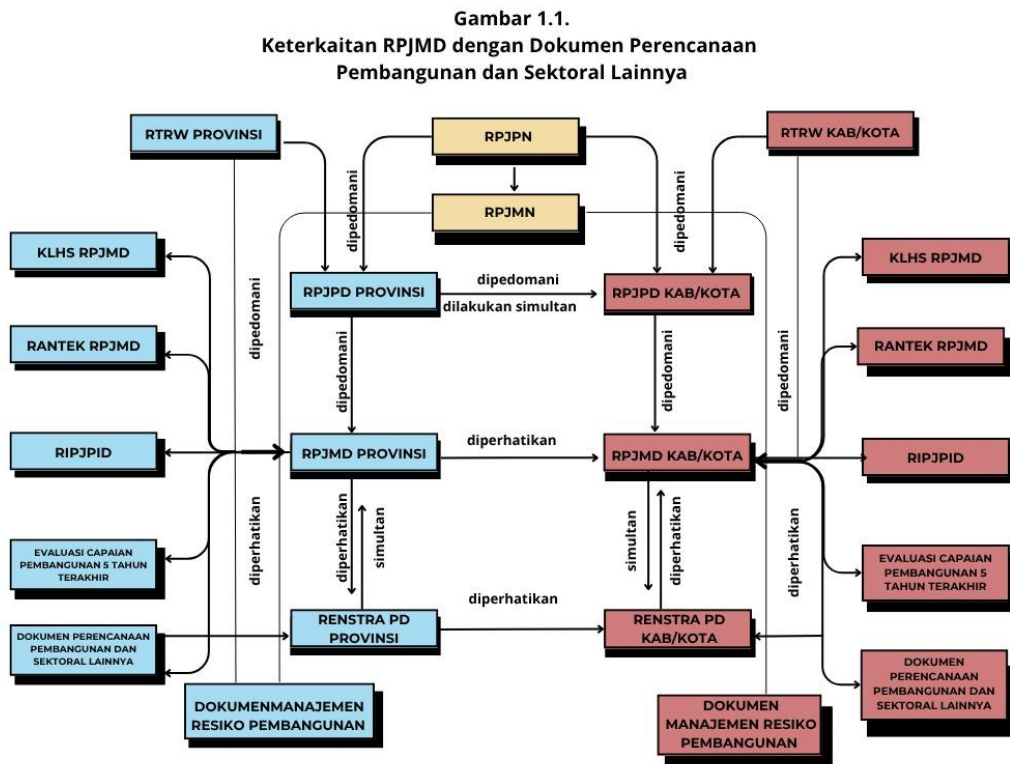
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan dalam rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat penjabaran perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas

Hulu sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disusun secara simultan dan merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, yang dalam penyusunannya selain mengacu pada dokumen RPJMD juga dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat bersinergi dengan perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat dan Nasional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini juga dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan tetap memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjadi pedoman dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat digambarkan pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : RPJMD Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar 5587);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029,
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan serta evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 - 2029. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra OPD adalah:

- Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- Merupakan alat ukur keberhasilan atau gagasan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 -2029 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 - 2026.
3. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan yang terarah dan terukur.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Bupati yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Renja, RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja dan RKT OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat Renstra dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun

- diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
 4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
 5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
 6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian rencana strategis dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra, meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang bersifat ultimate goal dan diharapkan dapat menjawab permasalahan organisasi secara obyektif.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan beserta indikator-indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu serta indikasi pendanaan untuk periode lima tahun.

BAB V PENUTUP

Memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 60 Tahun 2016 Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada uraian berikut :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Bidang Statistik Dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan fungsi;

1. Perumusan program kerja dibidang komunikasi, informatika dan statistik serta persandian;
2. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika dan statistik serta persandian;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika dan statistik serta persandian;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis dibidang komunikasi, informatika dan statistik serta persandian;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang komunikasi, informatika dan

- statistik serta persandian;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika dan statistik serta persandian;
 7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tupoksinya, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian dan 2 (dua) Bidang, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- d. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sesuai dengan kewenangan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penetapan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
2. pengkoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
3. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
4. penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Dinas;
5. pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan program kegiatan sekretariat;
2. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan administrasi keuangan ;
5. Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
6. Penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
7. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
10. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari;
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Aparatur;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Masing- masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan kinerja dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut;

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 - c) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahanii Pelaksanaan Anggaran;
 - d) penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 - e) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - f) pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
 - g) penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
 - h) penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
 - i) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
 - j) pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
 - k) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Aparatur**
- Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum

dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- c) penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d) penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- e) penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut: fungsi :

1. penyusunan rencana operasional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
2. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik;
3. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
4. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari kelompok jabatan fungsional

d. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik dan aplikasi informatika. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut:

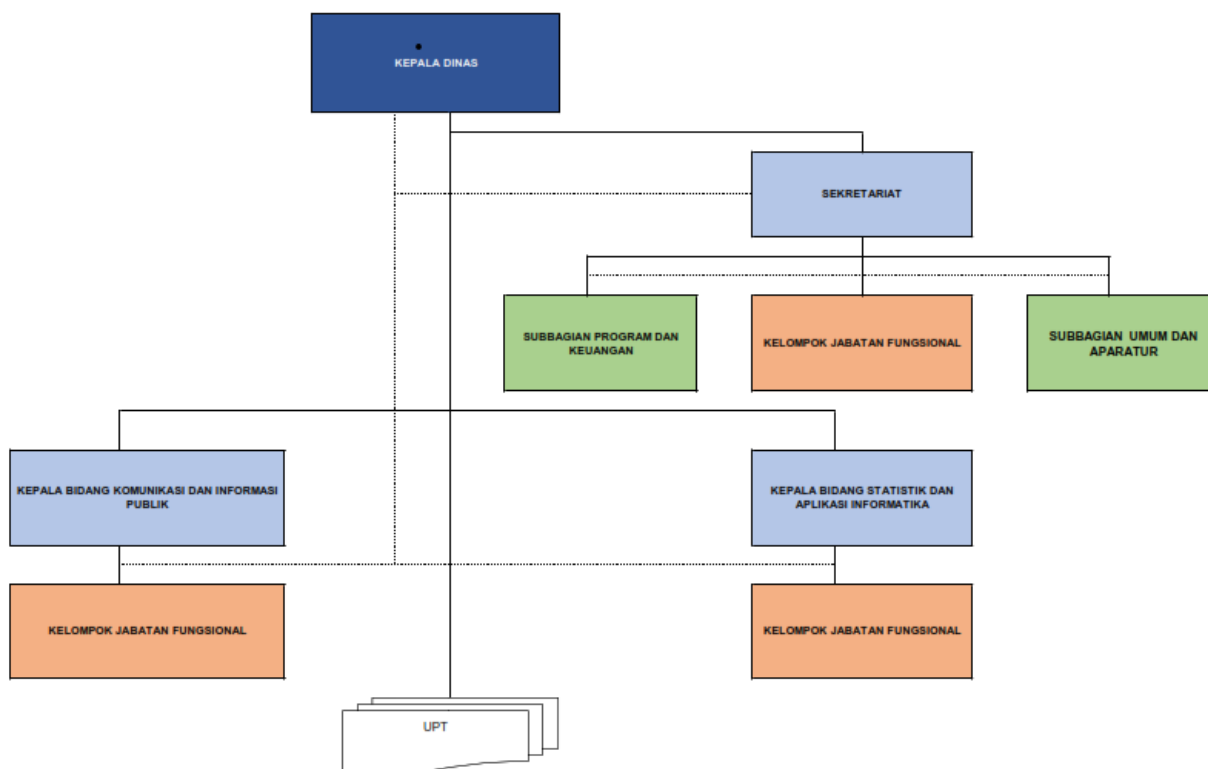
1. penyusunan rencana operasional Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
2. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
3. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah,
4. penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah;
5. penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
6. penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
7. penyelenggaraan kegiatan di bidang penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
8. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam

Gambar 2.1

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber :Bag.Organisasi Setda Kabupaten Kapuas Hulu

2.2.Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menyelenggarakan urusan bidang Pemerintahan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kewenangannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai, terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara dan 2 (dua) orang Non Aparatur Sipil Negara. Berikut disampaikan gambaran umum keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data per 31 Mei 2025, yang merupakan deskripsi Pegawai dari kategori Jabatan, Pendidikan Formal, dan Jenis Kelamin.

a. Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebanyak 4 formasi jabatan struktural yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum terisi seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Pegawai Menurut Jabatan

No.	Unit Kerja	Eselon			Fungsional	Non ASN	Jumlah
		II	III	IV			
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	4	-	5
3.	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	-	1	-	2	-	3
4.	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	-	1	-	6	2	9
	Jumlah	1	2	1	12	2	18

b. Pegawai Menurut Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2

Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	1	3	4	7	-	-	15
2	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	1	4	-	2	-	-	7
3	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	-	9	-	-	-	-	9
4	Tenaga Kontrak	-	1	1	-	-	-	2
	Jumlah	2	17	5	9	-	-	33

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas, tingkat pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang paling banyak adalah berpendidikan S1 sebanyak 17 Orang (51,52%), selanjutnya berturut turut Pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 9 orang (27,27%), D3 sebanyak 5 Orang (15,15%), dan S2 sebanyak 2 Orang (6,06%).

Secara garis besar, tingkat pendidikan Pegawai dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kapuas Hulu yang cukup baik, merupakan komponen utama yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara umum.

c. Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Sampai akhir bulan Mei 2025, dapat disampaikan bahwa dari seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 33 orang terdapat Pegawai laki-laki sejumlah 18 orang dan Pegawai perempuan sejumlah 15 orang. Gambar berikut menunjukkan bahwa prosentase Pegawai laki-laki Lebih besar (54.55%) dari jumlah Pegawai Perempuan (45.45%).

Tabel 2.3
Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jlh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	8	7	15
2	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	4	3	6
3	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	5	4	9
4	Tenaga Kontrak	1	1	2
Jumlah		18	15	33

Sumber : Data Olahan

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Jika dilihat kondisi sarana prasarana pendukung sebagian besar sudah tidak layak untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan dan perlu dilakukan peremajaan atau pengantian, sehingga dalam pelaksanaan Renstra 2025 – 2029 akan dianggarkan dalam pembiayaan. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	0	Baik
2	Tanah Lapangan Pemancar Tv/Radio/Radar	22	22	0	Baik
3	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	28	28	0	Baik
4	Lemari Besi/Metal	2	2	0	Baik
5	Lemari Kayu	1	1	0	Baik
6	Rak Besi	1	1	0	Baik
7	Filing Cabinet Besi	2	2	0	Baik
8	Brandkas	1	1	0	Baik
9	Mesin Absensi	2	2	0	Baik
10	Papan Nama Instansi	2	2	0	Baik
11	Papan Pengumuman	1	1	0	Baik

12	Cd	6	0	6	Rusak
13	Meja Kerja Kayu	11	11	0	Baik
14	Meja Rapat	3	3	0	Baik
15	Kursi Tamu	3	3	0	Baik
16	Kursi Putar	3	3	0	Baik
17	Meja Komputer	3	3	0	Baik
18	Sofa	1	1	0	Baik
19	Ls	1	1	0	Baik
20	Ac	15	9	6	Rusak
21	Televisi	4	4	0	Baik
22	Sound System	1	0	1	Rusak
23	Dispenser	5	4	1	Rusak Berat
24	Handy Cam	4	4	0	Baik
25	Karpet	2	2	0	Baik
26	Tangga	1	1	0	Baik
27	Lampu	1	0	1	Rusak
28	Tangki Air	1	1	0	Baik
29	Mesin Pompa Air	1	1	0	Baik
30	Penyedot Debu	1	1	0	Baik
31	Antena Satelit Parabola	4	0	4	Rusak

32	Alat Pemadam/Portable	2	2	0	Baik
33	Audio Amplifier	3	3	0	Baik
34	Multitrack Recorder	1	1	0	Baik
35	Telephone Hybrid	1	1	0	Baik
36	Microphone/Wireless Mic	7	6	1	Rusak
37	Microphone/Boom Stand	1	1	0	Baik
38	Power Amplifier	1	0	1	Rusak
39	Digital Audio Taperecorder	4	0	4	Rusak
40	Microphone Cable	1	1	0	Baik
41	Speaker	2	2	0	Baik
42	Modul Pa	1	1	0	Baik
43	Camera Electronic	2	0	2	Rusak
44	Video Mixer	4	2	2	Rusak
45	Power Supply	6	6	0	Baik
46	Editing Electronic	1	1	0	Baik
47	Tripod Camera	2	2	0	Baik
48	Camera Film	1	1	0	Baik
49	Lensa Kamera	2	2	0	Baik
50	Mixer	1	1	0	Baik
51	Layar Film/Projector	2	2	0	Baik
52	Camera Digital	1	0	1	Rusak
53	Lampu Blitz Kamera	1	1	0	Baik

54	Computer Editing	2	2	0	Baik
55	Video Splitter	1	1	0	Baik
56	Camera Conference	1	1	0	Baik
57	Peralatan On Air	3	1	0	Baik
58	Mesin Jilid Bundar	1	0	1	Rusak
59	Wireless	1	1	0	Baik
60	Peralatan Jaringan Internet	1	1	0	Baik
61	Kabel Hdmi	1	1	0	Baik
62	Stand	4	1	0	Baik
63	Handy Talky (Ht)	17	1	0	Baik
64	Handy Cam	3	1	0	Baik
65	Wireless Amplifier	5	1	0	Baik
66	Infocus	3	2	1	Rusak
67	Alat Df Radio Hf/Fm	3	0	1	Rusak
68	Unit Pemancar Vhf/Fm Portable	8	1	7	Rusak
69	Antene Vhf/Fm Stationary	1	1	0	Baik
70	Switcher Antena	2	0	2	Rusak
71	Coaxial Feeder	4	4	0	Baik
72	Receiver Stl/Uhf	2	2	0	Baik

73	Compressor Amplifier	1	0	1	Rusak
74	Lopas Filter	1	1	0	Baik
75	Conecctor	6	0	6	Rusak
76	Unit Antena Transceiver Vhf Transportable	24	0	24	Rusak
77	Multiplex Terminal Equipment	2	0	2	Rusak
78	Lcd Kontrol Sensor	1	1	0	Baik
79	Audio Processor Am	1	0	1	Rusak
80	Audio Monitor	2	0	2	Rusak
81	Peralatan Antena Penerima Vhf	3	0	3	Rusak
82	Stereo Generator Fm	2	0	2	Rusak
83	Mobil	2	1	1	1 Rusak/ 1 Baik
84	Sepeda Motor	13	7	6	6 Rusak /7 Baik
85	Komputer	8	8	0	Baik
86	Notebook	12	10	2	10 Baik / Rusak
87	Laptop	20	20	0	Baik
88	Printer	20	11	9	11 Baik/9 Rusak
89	Drone	2	1	1	1 Baik / 1 Rusak
90	Tablet	10	10	0	Baik
91	Mikrotik Jaringan	2	2	0	Baik

92	Ups	4	4	0	Baik
93	Scanner	3	3	0	Baik
94	Monitor	4	4	0	Baik
95	Printer	20	18	2	18 Baik / 2 Rusak
96	Server	3	2	1	2 Baik / 1 Rusak
97	Router	6	5	1	5 Baik / 1 Rusak
98	Modem	3	0	3	Rusak
99	Wireless Access Point	2	2	0	Baik
100	Kabel Lan	2	1	1	1 Baik / 1 Rusak
101	Hardisk	2	2	0	Rusak
102	Ipad	1	1	0	Baik
103	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	7	7	0	Baik
104	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	1	0	Baik
105	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	4	4	0	Baik
106	Rumah Negara Golongan Ii Tipe A Semi Permanen	1	1	0	Baik
107	Tugu Pembangunan	1	1	0	Baik
108	Pagar Semi Permanen	1	1	0	Baik
109	Jaringan Listrik	1	1	0	Baik
110	Jaringan Listrik Kantor	1	1	0	Baik
111	Jaringan Internet	1	1	0	Baik

112	Website	2	2	0	Baik
-----	---------	---	---	---	------

Sumber : Data Olahan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Pada tabel berikut disampaikan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam kurun waktu 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2021-2026 yaitu pada bulan Desember 2025 Tabel 2.5

Tabel 2.5

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Predikat SAKIP	BB	BB	100	BB	B	82	BB	BB	90	BB	BB	97%	BB	N/A	-
2.	Indeks Pelaksanaan SPBE	2.60	2.36	91%	2.65	2.76	104 %	2.70	2.78	103 %	2.80	2.82	101 %	2.90	3.28	113 %
3.	Indeks Pembangunan Statistik				-	1,74	0%	2,00	1,93	97%	2,26	2,26	100 %	2,30	2,26	98 %
4.	Jumlah Dataset yang Terintegrasi	-	-	0%	300	330	110 %	315	442	140 %	330	520	158 %	-	-	-
5.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,1	85,96	98%	88,1	99,18	113 %	88,2	97,28	110 %	88,3	94,76	107 %	88,5	99,51	112 %

Sumber : Lakip Diskominfo 2024

Kinerja pelayanan Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tergambar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 – 2024 dengan pengembangan pelayanan komunikasi dan informatika dan statistik dengan isu strategis tersebut dapat terangkum dalam indikator kinerja utama (IKU) dengan perhitungan penilaian kinerja sebagai berikut :

1. *Predikat Sakip*, dengan perhitungan pada kondisi awal 2021 dengan Predikat BB belum mencapai target namun pada tahun 2024 dapat melebihi target dengan realisasi 97%.
2. *Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu*, dengan perhitungan pada kondisi awal Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah 2,36 dengan predikat Baik, sedangkan pada Tahun 2022 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu yang ditargetkan adalah Nilai Indeks 2,65 dengan predikat baik dapat terpenuhi 104% dengan nilai 2,76, Tahun 2023 Target Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu adalah 2,70 dengan predikat baik terpenuhi 103% dengan nilai 2,78 dan di tahun 2024 target Indeks SPBE 2.80 dapat teralisasi 101% dengan Nilai 2.82
3. *Nilai Indeks Pembangunan Statistik*, dengan perhitungan pada kondisi awal 2022 dengan Realisasi 1.74 dan terus meningkat setiap tahun nya, pada tahun 2023 dengan target 2.00 dapat teralisasi dengan nilai 1.93 dengan capaian 97% dan pada tahun 2024 dengan target 2.26 dapat terealisasi dengan baik dengan nilai 2.26 yang artinya target tercapai 100%.
4. Persentase kompilasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan kondisi awal tahun 2022 adalah 100%. Target 2022-2024 adalah 100% pertahun. Data berasal dari 26 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2022 targer data set terintegrasi 300 dapat terealisasi sebanyak 330 dengan capaian 100% dan terus meningkat setiap tahunnya di tahun 2023 dengan target 315 data set dapat terealisasi sebanyak 442 data set dengan capaian 140% dan ditahun 2024 dengan target 330 data set dapat terealisasi sebanyak 520 data set terintegrasi dengan capaian 158%.
5. Adapun dari Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2021 pada Kategori Pemerintah

Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat berdasarkan KOMISI INFORMATIF Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan SK Nomor: 06/KI.KALBAR/SK/11/2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Mendapatkan Kualifikasi INFORMATIF dengan Nilai (85,96) berzonasi Hijau adapun pada target Renstra (2021-2026) yaitu dengan Nilai (88,1). Pada Tahun 2022 yang juga berdasarkan kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat telah berdasarkan pada penilaian KOMISI INFORMATIF Provinsi Kalimantan Barat Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik telah melakukan penargetan untuk nilai keterbukaan informasi public dengan Nilai (88,1) yang berdasarkan renstra 2021-2026, dan berdasarkan surat keputusan dengan nomor: 08/KI.KALBAR/SK/11/2022. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 telah memperoleh Nilai (99,18) dengan kualifikasi INFORMATIF dan berzonasi Hijau, tahun 2023 dinas komunikasi informatika dan statistic kabupaten Kapuas hulu mendapat penilaian Kembali dengan berdasarkan surat keputusan dengan nomor: 11/SK/K.I.KALBAR/12/2023. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh Nilai (97,28) dengan kualifikasi INFORMATIF dan berzonasi Hijau, serta Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06/KI.KALBAR/SK/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik SeKalimantan Barat Tahun 2024, nilai perolehan Keterbukaan Informasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 adalah 94,76 dalam kategori Informatif / Zona Hijau.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kelompok sasaran layanan yaitu Pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi target utama penerima manfaat dari program, layanan, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
PROGRAM: PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan Informasi Publik		
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
Kegiatan; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kapuas Hulu		
Sub Kegiatan: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Masyarakat	Kabupaten Kapuas Hulu
Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	Masyarakat, ASN, Perangkat Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu
Sub Kegiatan: pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Masyarakat, Media Masa, Perangkat Daerah Pemkab Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu
Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Masyarakat, Badan Publik PPID Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu
Sub Kegiatan: enyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Masyarakat dan KIM	Kabupaten Kapuas Hulu
ROGRAM: PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi informatika yang sesuai standar yang telah ditetapkan		
Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Persentase perangkat daerah dan UPT yang menggunakan domain resmi pemerintah daerah		

Daerah Kabupaten/Kota	dalam penyelenggaraan layanan elektronik		
Sub Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah dan Desa	Perangkat Daerah dan Desa	Kabupaten Kapuas Hulu
Kegiatan: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
Sub Kegiatan: Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi SPBE	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu
Sub Kegiatan: Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu
Sub Kegiatan: Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu
Sub Kegiatan: Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu
PROGRAM: PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik		
	Jumlah dataset yang terintegrasi		
Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Data	Persentase kegiatan statistik sektoral	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu

Statistik Sektoral	yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data		
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi Standar data, metadata, Interoperabilitas data dan kode referensi dam/atau data induk	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu
PROGRAM: PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komposit Pengamanan Aset TIK		
Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu
Kegiatan: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi		
Sub Kegiatan: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu

2.5. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor permasalahan dan kendala dari pelayanan perangkat daerah, yaitu:

1. Masih terbatasnya ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta jumlah staf yang belum sesuai dengan kebutuhan OPD.

2. Sumber daya dan sarana prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk integrasi layanan dan integrasi jaringan masih terbatas
3. Terbatasnya sumber daya dan prasarana untuk meningkatkan keamanan data dan informasi dalam implementasi Sistem Pemerintah Digital.
4. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
5. Adanya potensi kesenjangan dimasyarakat, utamanya bagi yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi dan akses internet.
6. Terbatasnya koordinasi, tidak terstandarnya pengembangan aplikasi, rendahnya integrasi layanan, dan belum optimalnya infrastruktur TIK menghambat peran Diskominfo dalam mewujudkan layanan digital pemerintah yang sinergis, terintegrasi, dan sesuai kebijakan Sistem Pemerintah Digital.
7. Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan antar negara yang memiliki dampak positif dan negative, diantaranya disparitas informasi masyarakat perbatasan terhadap informasi kebijakan lokal dan nasional;
8. Minimnya literasi media dan informasi yang disebabkan keterbatasan akses telekomunikasi.

2.6. Penetapan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas, berikut dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya publikasi informasi dan dokumentasi oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
2. Rendahnya produktivitas diseminasi informasi publik.
3. Rendahnya pemberdayaan komunitas informasi Masyarakat.
4. Masih rendahnya kualitas data statistic sectoral yang dihasilkan oleh OPD untuk mendukung perencanaan dan evaluasi Pembangunan.

5. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan forum satu data dalam meningkatkan kualitas data statistic sectoral.
6. Masih rendahnya Tingkat keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta adanya fungsi perangkat daerah. Adapun pembangunan di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan adalah:

1. Optimalnya Predikat Pelaksanaan Pemerintah Digital Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah:

1. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik
 - a. Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pemerintah Digital Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Sekretariat
 - a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut tabel Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

NO	TUJUAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan daya saing daerah	Optimalnya Predikat Pelaksanaan Pemerintah Digital Kabupaten Kapuas Hulu	Terwujudnya Pemerintah Berbasis digitalisasi yang efektif, Informatif dan Kolaboratif	Indeks Pelaksanaan Pemerintah Digital	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah digital Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai bobot domain manajemen Pemerintah Digital	"Pengelolaan E-Government dan Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.	Indeks Pembangunan Statistik	Meningkatnya kualitas pengelolaan statistik sektoral	Nilai bobot domain yang terdiri dari prinsip SDI, domain kualitas data, domain bisnis statistik, domain kelembagaan, dan domain statistik nasional	"Pengelolaan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota "
2.		Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu	Persentase Masyarakat yang terpapar Informasi Publik Melalui Berbagai media Komunikasi Pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja DISKOMINFO	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Secara Akuntabel dan Sistematis	Persentase Dokumen Perencanaan di susun sesuai dengan pedoman	Peningkatan Kualitas Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

						Persentase Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai dengan Peraturan	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Persentase Pengelolaan BMD sesuai dengan pedoman	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DISKOMINFO	Indek Kepuasan Masyarakat pada DISKOMINFO	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Manajemen Pelayanan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan	Peningkatan Kualitas Sistem, Sarana dan Prasarana Pelayanan
						Persentase Layanan Administrasi Umum yang tepat waktu	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.2 STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi dan arahan kebijakan dalam rencana strategi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Adanya strategi dan kebijakan ini membantu bagaimana cara Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi dinas.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Memiliki peran dalam mewujudkan VISI “**Kapuas Hulu Semakin Hebat**” (Semakin Harminis, Semakin Eneqik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil) melalui MISI antara lain:

MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas, misi ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat secara adil. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

untuk mencapai tujuan RPJMD Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Daya Saing Daerah, Sasaran RPJMD Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik yang efektif, Informatif dan Kolaboratif dengan capaian indikator yaitu predikat SPBE, Predikat KIP, Indeks Pembangunan Statistik.

Sesuai dengan peran visi dan misi di atas, penjabaran terkait strategi dan arah kebijakan Pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya penyelenggaraan Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, informatif dan kolaboratif	Optimalnya Predikat Pelaksanaan Pemerintahan Digital Kabupaten Kapuas Hulu	Terwujudnya Pemerintah Berbasis digitalisasi yang efektif, Informatif dan Kolaboratif	Indeks Pelaksanaan Pemerintahan Digital	2,90	1,30	1,50	1,70	1,90	2,0	Tahun 2025 masih menggunakan Target Indeks SPBE
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.	Indeks Pembangunan Statistik	2,26	2,36	2,36	2,46	2,46	2,56	
	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,5	90	91	92	93	93,50	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISKOMINFO	78	78,5	79	79,5	80	80,1	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik pada DISKOMINFO	Indek Kepuasan Masyarakat pada DISKOMINFO	82,9	83,4	83,9	84,4	84,9	85,29	

o **Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mencapai tujuan dan sasaran Restra Tahun 2025-2029**

Strategi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penantuan program/ kegiatan /sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2025-2029 dilakukan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dimaksud sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3.
Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pemerintah Digital Kabupaten Kapuas Hulu;	Program Pengelola Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik pada DISKOMINFOTIK	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Manajemen Pelayanan	Peningkatan Kualitas Sistem, Sarana dan Prasarana Pelayanan
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program beserta pagunnya selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing masing program prioritas ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah bagi penerima manfaat yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas Telah tersusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD, tugas dan fungsi, serta tujuan dan sasaran pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu:

4.1.1. SEKRETARIAT

- **Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. *Kegiatan:* Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub-Kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah;
 9. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah.
- b. Kegiatan; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub kegiatan:
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub kegiatan:
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- e. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

4.1.2. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

- o **Program: Program Informasi Dan Komunikasi Publik**
 - a. Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan:
 1. Relasi Media;
 2. Pelayanan Informasi public Serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komis Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 3. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
 4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
 5. Desiminasi Informasi;

6. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;/ Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
7. Penyusun Strategi Komunikasi Publik;/ Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
8. Penyusunan Konten.
9. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

4.1.3. BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA

- **Program: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

- a. Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraa Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.

- b. Kegiatan: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
2. Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi;
3. Fasilitas Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo;
4. Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
5. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
6. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan;
7. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
8. Penyediaan Akses Internet;

9. koordinasi penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
10. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
11. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
12. Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK
13. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah

○ **Program: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- a. Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan:

1. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional;
2. Pemenuhan Prinsip Satu data Indonesia;
3. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
5. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar;
6. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

○ **Program: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten Kota.**

- a. Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan:

1. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan;
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah;
3. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan

Persandian Pemerintah Daerah

4. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Tabel 4.1

Program Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	
2.	Menyediakan akses internet bagi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
3.	Menyediakan akses Internet bagi masyarakat pada fasilitas umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintah Digital	Penyediaan Akses Internet	
4.	Literasi Digital tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah digital, bahaya judi online, bahaya pinjaman online kepada ASN Provinsi, Sekolah di bawah Kewenangan Pemda dan kelompok masyarakat melalui media daring (tatap muka secara online/ dengan iklan melalui wifi publik yang dikelola Diskominfo) dan Luring	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi Sistem Pemerintah digital dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Digital	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi Sistem Pemerintah Digital dan/atau kolaborasi penyelenggaraan Sistem Pemerintah Digital	
5.	Satu Data Indonesia	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	

		tersediannya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
6.	Tim Tanggap Insiden Siber	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Penyediaan layanan keamanan informasi dan Persandian Pemerintah	
		Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Penetapan Tata kelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah	

4.1.4. INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pembangunan berjalan terarah dan terukur. Berdasarkan hubungan tujuan dan sasaran daerah dengan perangkat daerah pada dokumen RPJMD Kapuas Hulu Tahun 2025 -2029, urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mendukung visi **“Kapuas Hulu Semakin HEBAT”**.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Ulasan terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
- 2) Identifikasi dan penentuan dalam tugas dan fungsi Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3) Identifikasi dan penentuan indikator dan target kinerja Dinas komunikasi, informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang berkontribusi

langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Dalam setiap kegiatan yang direncanakan ada tiga jenis indikator yang biasa digunakan sebagai acuan dalam Pemantauan dan Evaluasi atau pengukuran kinerja dinas yaitu:

- 1) Indikator *Masukan*, yang mencakup antara lain dana yang dianggarkan, sumber daya manusia, dan sarana;
- 2) Indikator *Keluaran* atau *Output*, yang antara lain terdiri dari jumlah peserta pelatihan, jumlah pementasan, buku yang dihasilkan, obyek yang dipelihara, dan lain-lain.
- 3) Indikator *Outcome*, yang antara lain terdiri dari jumlah peserta yang mampu menerapkan hasil pelatihan, jumlah sanggar yang dibina, jumlah obyek yang terpelihara dan lain-lain.

Periode pembangunan tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Hulu. Indikator Kinerja Utama Disporapar Kabupaten Kapuas Hulu periode Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPD/RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah bersifat strategis dan mengukur dampak besar dimana ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis organisasi dalam Bidang Komunikasi Informasi Publik, dan Statistik Aplikasi Informatika. IKU adalah metrik terukur yang mencerminkan keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. IKU didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan Informasi Publik Dan Statistik Aplikasi Informatika. Penjabaran IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana terlihat pada dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Pemerintah Berbasis digitalisasi yang efektif, Informatif dan Kolaboratif	Indeks Pelaksanaan Pemerintah Digital	Indeks	2,90	1,30	1,50	1,70	1,90	2,0	Tahun 2025 masih menggunakan Target Indeks SPBE
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,26	2,36	2,36	2,46	2,46	2,56	
3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	88,5	90	91	92	93	93,50	
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	80,1	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik pada DISKOMINFO	Indek Kepuasan Masyarakat pada DISKOMINFO	Indeks	82,9	83,4	83,9	84,4	84,9	85,29	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang menggambarkan kontribusi langsung perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target-target IKK disusun dengan mempertimbangkan Arah Kebijakan Nasional, potensi dan

permasalahan daerah, serta kapasitas kelembagaan perangkat daerah. Dengan adanya IKK yang terukur dan realistis, diharapkan kinerja pemerintahan daerah dapat dievaluasi secara obyektif, serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	a)	persentase perangkat daerah yg terhubung dgn akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	%	2	60	60	60	60	60	
	b)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	21	43	64	86	100	
	c)	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	72,37	73	74	75	76	77	
2	STATISTIK									
	a)	persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	b)	persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam	%	100	100	100	100	100	100	

		melakukan evaluasi pembangunan daerah								
3	PERSANDIAN									
	a)	tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	%	Tingkat Kondisi Awal	Tingkat Kondisi Awal	Tingkat Kondisi Awal	Tingkat Kondisi Awal	Tingkat Kondisi Awal	Tingkat Kondisi Awal	

Target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 Dan Target Kinerja pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Tercantum dalam Lampiran Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, tahun 2025 - 2029 adalah salah satu dokumen perencanaan pendapatan dari Pajak Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Dokumen Renstra ini dipergunakan juga sebagai dasar pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tahunan dan lima Tahunan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Bupati yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi OPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun VISI dan MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 terutama Misi yang melekat pada Tugas dan Fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yaitu: **MISI (Keempat) 4** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas.

Selain itu, dokumen Renstr aini diharapkan dapat menjawab berbagai isu Strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam Upaya Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN

Tabel 4.4.

Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2026-2030

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A			Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
					75,6	78	78,5	79	79,5	80	80,1	80,2			Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota					
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik pada DISKOMINFO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat pada DISKOMINFO	82,81	83,9	-	83,4	83,9	84,4	84,9	85,29	85,3					Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
	Terwujudnya Pemerintah Berbasis digitalisasi yang efektif, Informatif dan Kolaboratif		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK			Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		2,82	2,9	1,30	1,50	1,70	1,90	2,00	2,60			Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota					
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Pembangunan Statistik	CUKUP	CUKUP	CUKUP	CUKUP	CUKUP	CUKUP	CUKUP	CUKUP	CUKUP	BAIK	BAIK			Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		
			Indeks Pembangunan Statistik	2,26	2,26	2,36	2,36	2,46	2,46	2,56	2,56			Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota						

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	94,76	88,5	90	91	92	93	93,5	93,5								Sekretariat DKIS
	2,16,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	2,16,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				Rp 4.033.198.750,00	Rp 14.359.115.746,00	Rp 16.334.226.933,00	Rp 16.867.669.280,00	Rp 18.336.004.550,00	Rp 19.948.890.886,00	Rp 19.341.199.080,88						
	2,16,01,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(OUTPUT)		Rp 119.082.400,00	Rp 119.082.400,00	Rp 126.990.640,00	Rp 135.689.704,00	Rp 145.258.674,00	Rp 155.784.535,00	Rp 167.362.988,50						
	2,16,01,2,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	Rp 13.226.400,00	Rp 13.226.400,00	Rp 14.549.040,00	Rp 16.003.944,00	Rp 17.604.338,00	Rp 19.364.772,00	Rp 21.301.249,20					Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
	2,16,01,2,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 9.460.000,00	Rp 9.460.000,00	Rp 10.406.000,00	Rp 11.446.600,00	Rp 12.591.260,00	Rp 13.850.386,00	Rp 15.235.424,60					Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
	2,16,01,2,01,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 9.800.000,00	Rp 9.800.000,00	Rp 10.780.000,00	Rp 11.858.000,00	Rp 13.043.800,00	Rp 14.348.180,00	Rp 15.782.998,00					Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
	2,16,01,2,01,04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	ersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 10.677.000,00	Rp 10.677.000,00	Rp 11.744.700,00	Rp 12.919.170,00	Rp 14.211.087,00	Rp 15.632.196,00	Rp 17.195.415,60					Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
	2,16,01,2,01,05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 10.153.000,00	Rp 10.153.000,00	Rp 11.168.300,00	Rp 12.285.130,00	Rp 13.513.643,00	Rp 14.865.000,00	Rp 16.351.500,00					Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	Rp 10.370.000,00	5 laporan	Rp 10.370.000,00	5 laporan	Rp 11.407.000,00	5 laporan	Rp 12.547.700,00	5 laporan	Rp 13.802.470,00	5 laporan	Rp 15.182.717,00	5 laporan	Rp 16.700.988,70	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	Rp 15.396.000,00	4 laporan	Rp 15.396.000,00	4 laporan	Rp 16.935.600,00	4 laporan	Rp 18.629.160,00	4 laporan	Rp 20.492.076,00	4 laporan	Rp 22.541.284,00	4 laporan	Rp 24.795.412,40	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	Rp 20.000.000,00	1 dokumen	Rp 20.000.000,00	1 dokumen	Rp 20.000.000,00	1 dokumen	Rp 20.000.000,00	1 dokumen	Rp 20.000.000,00	1 dokumen	Rp 20.000.000,00	1 dokumen	Rp 20.000.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0 Data	Rp 20.000.000,00	1 Data	Rp 20.000.000,00	1 Data	Rp 20.000.000,00	1 Data	Rp 20.000.000,00	1 Data	Rp 20.000.000,00	1 Data	Rp 20.000.000,00	1 Data	Rp 20.000.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 2.810.248.000,00		Rp 2.836.814.928,00		Rp 3.159.696.033,00		Rp 2.925.985.291,00		Rp 2.999.825.160,00		Rp 3.079.093.596,00		Rp 2.459.823.337,38	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32 org/bulan	Rp 2.584.464.000,00	32 org/bulan	Rp 2.584.464.000,00	32 org/bulan	Rp 2.842.910.400,00	32 org/bulan	Rp 2.609.199.658,00	32 org/bulan	Rp 2.683.039.527,00	32 org/bulan	Rp 2.762.307.963,00	32 org/bulan	Rp 2.762.307.963,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp 15.602.428,00	1 dokumen	Rp 80.037.133,00	1 dokumen	Rp 80.037.133,00	1 dokumen	Rp 80.037.133,00	1 dokumen	Rp 80.037.133,00	1 dokumen	Rp 80.037.133,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 178.705.500,00	1 dokumen	Rp 178.705.500,00	1 dokumen	Rp 178.705.500,00	1 dokumen	Rp 178.705.500,00	1 dokumen	Rp 178.705.500,00	1 dokumen	Rp 178.705.500,00	1 dokumen	Rp 178.705.500,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	Rp 15.020.500,00	1 laporan	Rp 15.020.500,00	1 laporan	Rp 15.020.500,00	1 laporan	Rp 15.020.500,00	1 laporan	Rp 15.020.500,00	1 laporan	Rp 15.020.500,00	1 laporan	Rp 15.020.500,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu,

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															Putussi bau Utara, Putussi bau Kota	
		2.16.01.2, 02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	1 dokumen	Rp 5.482.250,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2, 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp 32.058.000,00	1 laporan	Rp 32.058.000,00	1 laporan	Rp 32.058.000,00	1 laporan	Rp 32.058.000,00	1 laporan	Rp 32.058.000,00	1 laporan	Rp 32.058.000,00	1 laporan	Rp 32.058.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2, 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp 6.770.500,00		Rp 6.770.500,00		Rp 7.447.550,00		Rp 8.192.305,00		Rp 9.011.537,00		Rp 9.912.696,00		Rp 9.912.696,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2, 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 677.000,00	1 Dokumen	Rp 677.000,00	1 Dokumen	Rp 744.700,00	1 Dokumen	Rp 819.170,00	1 Dokumen	Rp 901.087,00	1 Dokumen	Rp 991.196,00	1 Dokumen	Rp 991.196,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2, 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1.151.500,00	1 Dokumen	Rp 1.151.500,00	1 Dokumen	Rp 1.266.650,00	1 Dokumen	Rp 1.393.315,00	1 Dokumen	Rp 1.532.647,00	1 Dokumen	Rp 1.685.912,00	1 Dokumen	Rp 1.685.912,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2, 03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Rp 864.000,00	1 Laporan	Rp 864.000,00	1 Laporan	Rp 950.400,00	1 Laporan	Rp 1.045.440,00	1 Laporan	Rp 1.149.984,00	1 Laporan	Rp 1.264.982,00	1 Laporan	Rp 1.264.982,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2, 03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	Rp 812.500,00	1 laporan	Rp 812.500,00	0 laporan	Rp 893.750,00	0 laporan	Rp 983.125,00	0 laporan	Rp 1.081.438,00	0 laporan	Rp 1.189.582,00	0 laporan	Rp 1.189.582,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2, 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	Rp 920.500,00	1 laporan	Rp 920.500,00	0 laporan	Rp 1.012.550,00	0 laporan	Rp 1.113.805,00	0 laporan	Rp 1.225.186,00	0 laporan	Rp 1.347.705,00	0 laporan	Rp 1.347.705,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2, 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Terlaksananya Penatausahaan	1 laporan	Rp 2.345.000,00	1 laporan	Rp 2.345.000,00	1 laporan	Rp 2.579.500,00	1 laporan	Rp 2.837.450,00	1 laporan	Rp 3.121.195,00	1 laporan	Rp 3.433.319,00	1 laporan	Rp 3.433.319,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu,

				Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD															Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp 79.960.200,00	Rp 88.188.200,00		Rp 97.007.020,00		Rp 106.707.722,00		Rp 117.378.494,00		Rp 129.116.345,00		Rp 129.116.345,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 unit	Rp -	Rp 8.228.000,00	2 unit	Rp 9.050.800,00	2 unit	Rp 9.955.880,00	2 unit	Rp 10.951.468,00	2 unit	Rp 12.046.615,00	2 unit	Rp 12.046.615,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 19.400.000,00	Rp 19.400.000,00	1 Paket	Rp 21.340.000,00	1 Paket	Rp 23.474.000,00	1 Paket	Rp 25.821.400,00	1 Paket	Rp 28.403.540,00	1 Paket	Rp 28.403.540,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 1.430.200,00	Rp 1.430.200,00	1 Dokumen	Rp 1.573.220,00	1 Dokumen	Rp 1.730.542,00	1 Dokumen	Rp 1.903.596,00	1 Dokumen	Rp 2.093.956,00	1 Dokumen	Rp 2.093.956,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 5.314.000,00	Rp 5.314.000,00	1 Dokumen	Rp 5.845.400,00	1 Dokumen	Rp 6.429.940,00	1 Dokumen	Rp 7.072.934,00	1 Dokumen	Rp 7.780.228,00	1 Dokumen	Rp 7.780.228,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp 5.931.000,00	Rp 5.931.000,00	1 Dokumen	Rp 6.524.100,00	1 Dokumen	Rp 7.176.510,00	1 Dokumen	Rp 7.894.161,00	1 Dokumen	Rp 8.683.577,00	1 Dokumen	Rp 8.683.577,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	Rp 47.885.000,00	Rp 47.885.000,00	1 Orang	Rp 52.673.500,00	1 Orang	Rp 57.940.850,00	1 Orang	Rp 63.734.935,00	1 Orang	Rp 70.108.429,00	1 Orang	Rp 70.108.429,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 636.280.500,00	Rp 737.740.850,00		Rp 813.514.935,00		Rp 896.866.428,00		Rp 988.553.071,00		Rp 1.089.408.378,00		Rp 1.089.408.378,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Rp 10.558.000,00	Rp 10.558.000,00	1 Paket	Rp 11.613.800,00	1 Paket	Rp 12.775.180,00	1 Paket	Rp 14.052.698,00	1 Paket	Rp 15.457.968,00	1 Paket	Rp 15.457.968,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

																					bau Kota
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 35.795.000,00	1 Paket	Rp 68.745.000,00	1 Paket	Rp 75.619.500,00	1 Paket	Rp 83.181.450,00	1 Paket	Rp 91.499.595,00	1 Paket	Rp 100.649.555,00	1 Paket	Rp 100.649.555,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Rp 12.050.000,00	1 Paket	Rp 16.250.000,00	1 Paket	Rp 17.875.000,00	1 Paket	Rp 19.662.500,00	1 Paket	Rp 21.628.750,00	1 Paket	Rp 23.791.625,00	1 Paket	Rp 23.791.625,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp 38.541.500,00	1 Paket	Rp 42.395.650,00	1 Paket	Rp 46.635.215,00	1 Paket	Rp 51.298.736,00	1 Paket	Rp 56.428.610,00	1 Paket	Rp 62.071.471,00	1 Paket	Rp 62.071.471,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Rp 49.737.000,00	1 Paket	Rp 54.710.700,00	1 Paket	Rp 60.181.770,00	1 Paket	Rp 66.199.947,00	1 Paket	Rp 72.819.942,00	1 Paket	Rp 80.101.936,00	1 Paket	Rp 80.101.936,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 32.744.000,00	1 Laporan	Rp 36.018.400,00	1 Laporan	Rp 39.620.240,00	1 Laporan	Rp 43.582.264,00	1 Laporan	Rp 47.940.490,00	1 Laporan	Rp 52.734.539,00	1 Laporan	Rp 52.734.539,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 445.277.000,00	1 Laporan	Rp 491.277.300,00	1 Laporan	Rp 542.405.030,00	1 Laporan	Rp 598.645.533,00	1 Laporan	Rp 660.510.086,00	1 Laporan	Rp 728.561.094,00	1 Laporan	Rp 728.561.094,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 11.578.000,00	1 Dokumen	Rp 12.735.800,00	1 Dokumen	Rp 14.009.380,00	1 Dokumen	Rp 15.410.318,00	1 Dokumen	Rp 16.951.350,00	1 Dokumen	Rp 18.646.485,00	1 Dokumen	Rp 18.646.485,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 5.050.000,00	1 Dokumen	Rp 5.555.000,00	1 Dokumen	Rp 6.110.500,00	1 Dokumen	Rp 6.721.550,00	1 Dokumen	Rp 7.393.705,00	1 Dokumen	Rp 7.393.705,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			Rp -		Rp 9.715.172.000,00		Rp 11.186.689.200,00		Rp 11.755.058.120,00		Rp 12.930.893.932,00		Rp 14.223.983.325,00		Rp 14.223.983.325,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota

																						sibau Kota
		2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp -	2 Unit	Rp 30.000.000,00	2 Unit	Rp 33.000.000,00	2 Unit	Rp 36.000.000,00	2 Unit	Rp 39.930.000,00	2 Unit	Rp 43.923.000,00	2 Unit	Rp 43.923.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp -		Rp -	1 Unit	Rp 500.000.000,00		Rp -		Rp -		Rp -	1 Unit	Rp -	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp -	2 Unit	Rp 10.000.000,00	2 Unit	Rp 11.000.000,00	2 Unit	Rp 12.100.000,00		Rp 13.310.000,00		Rp 14.641.000,00		Rp 14.641.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Rp -	1 Unit	Rp 150.000.000,00	1 Unit	Rp 165.000.000,00	1 Unit	Rp 181.500.000,00		Rp 199.650.000,00		Rp 219.615.000,00		Rp 219.615.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Tersedianya Aset Tak Berwujud		Rp -	5 unit	Rp 50.000.000,00	5 unit	Rp 55.000.000,00	5 unit	Rp 60.500.000,00		Rp 66.550.000,00		Rp 73.205.000,00		Rp 73.205.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp -	1 Unit	Rp 9.275.172.000,00	1 Unit	Rp 10.202.689.200,00	1 Unit	Rp 11.222.958.120,00		Rp 12.345.253.932,00		Rp 13.579.779.325,00		Rp 13.579.779.325,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp -	1 Unit	Rp 50.000.000,00	1 Unit	Rp 55.000.000,00	1 Unit	Rp 60.500.000,00		Rp 66.550.000,00		Rp 73.205.000,00		Rp 73.205.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp -	1 Unit	Rp 150.000.000,00	1 Unit	Rp 165.000.000,00	1 Unit	Rp 181.500.000,00		Rp 199.650.000,00		Rp 219.615.000,00		Rp 219.615.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 269.047.150,00		Rp 363.871.865,00		Rp 422.259.052,00		Rp 464.484.957,00		Rp 510.930.453,00		Rp 562.023.499,00		Rp 562.023.499,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	

		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48 Unit	Rp 18.920.000,00	48 Unit	Rp 20.812.000,00	48 Unit	Rp 22.893.200,00	48 Unit	Rp 25.182.520,00	48 Unit	Rp 27.700.772,00	48 Unit	Rp 30.470.849,00	48 Unit	Rp 30.470.849,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			5 unit	Rp 8.000.000,00	5 unit	Rp 8.800.000,00	5 unit	Rp 9.680.000,00	5 unit	Rp 10.648.000,00	5 unit	Rp 11.712.800,00	5 unit	Rp 11.712.800,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			5 unit	Rp 5.000.000,00	5 unit	Rp 5.500.000,00	5 unit	Rp 6.050.000,00	5 unit	Rp 6.655.000,00	5 unit	Rp 7.320.500,00	5 unit	Rp 7.320.500,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 unit	Rp 201.183.000,00	1 unit	Rp 221.301.300,00	1 unit	Rp 243.431.430,00	1 unit	Rp 267.774.573,00	1 unit	Rp 294.552.030,00	1 unit	Rp 294.552.030,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	Rp 10.000.000,00	1 unit	Rp 11.000.000,00	1 unit	Rp 12.100.000,00	1 unit	Rp 13.310.000,00	1 unit	Rp 14.641.000,00	1 unit	Rp 14.641.000,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	Rp 103.301.003,00	1 unit	Rp 115.631.103,00	1 unit	Rp 129.194.213,00	1 unit	Rp 144.113.635,00	1 unit	Rp 160.524.999,00	1 unit	Rp 160.524.999,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			1 Ha	Rp 1.000.000,00	1 Ha	Rp 1.100.000,00	1 Ha	Rp 1.210.000,00	1 Ha	Rp 1.331.000,00	1 Ha	Rp 1.464.100,00	1 Ha	Rp 1.464.100,00	Sekretariat DKIS	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Rp 3.550.000,00		Rp 3.590.000,00		Rp 3.630.000,00		Rp 3.670.000,00		Rp 3.710.000,00		Rp 3.700.000,00		Rp 3.735.000,00		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks			Rp 3.550.000,00		Rp 3.590.000,00		Rp 3.630.000,00		Rp 3.670.000,00		Rp 3.710.000,00		Rp 3.700.000,00		Rp 3.735.000,00		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

		2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Terlaksananya Relasi Me	10 Laporan	3.050.000.000	10 Laporan	3.055.000.000	10 Laporan	3.060.000.000	10 Laporan	3.065.000.000	10 Laporan	3.070.000.000	10 Laporan	3.075.000.000	10,0	3.080.000.000	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Komunitas	50.000.000	2 Komunitas	55.000.000	3 Komunitas	60.000.000	3 komunitas	65.000.000	3 komunitas	70.000.000	3 komunitas	75.000.000	3,0	80.000.000	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	12 Rekomendasi	50.000.000	12 Rekomendasi	55.000.000	12 Rekomendasi	60.000.000	12 Rekomendasi	65.000.000	12 Rekomendasi	70.000.000	12 Rekomendasi	75.000.000	12,0	80.000.000	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Terlaksananya Diseminasi Informasi	50%	50.000.000	51%	55.000.000	52%	60.000.000	53%	65.000.000	54%	70.000.000	55%	75.000.000	100%	80.000.000	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	10 Media	100.000.000	10 Media	105.000.000	10 Media	110.000.000	10 Media	115.000.000	10 Media	120.000.000	10 Media	75.000.000	10,0	75.000.000	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2.01.22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	55.000.000	7 Dokumen	60.000.000	7 Dokumen	65.000.000	7 Dokumen	70.000.000	7 Dokumen	75.000.000	7,0	80.000.000	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Konten	2000 Konten	150.000.000	2050 Konten	155.000.000	2100 Konten	160.000.000	2150 Konten	165.000.000	2200 Konten	170.000.000	2300 Konten	175.000.000	2400,0	180.000.000	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2 Orang	50.000.000	2 Orang	55.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	65.000.000	2 Orang	70.000.000	2 orang	75.000.000	2,0	80.000.000	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi	100%	126.445.000	100%	139.089.500	100%	Rp144.089.500,00	100%	Rp149.089.500,00	100%	Rp154.089.500,00	100%	Rp159.089.500,00	100%	Rp164.089.500,00	Bidang Komuni kasi dan informasi Publik	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

			Aplikasi Umum SPBE	dan pengembangan aplikasi SPBE																	
		2.16.03.2.02.33	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			3 Aplikasi	Rp 52.500.000,00	3 Aplikasi	Rp 57.750.000,00	3 Aplikasi	Rp 63.525.000,00	3 Aplikasi	Rp 69.877.500,00	3 Aplikasi	Rp 76.865.250,00	15 Aplikasi	Rp 76.865.250,00	Bidang Statistik dan Aplikasi informatika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.35	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE			2 Laporan	Rp 38.646.190,00	2 Laporan	Rp 42.510.809,00	2 Laporan	Rp 46.761.888,00	2 Laporan	Rp 51.438.077,00	2 Laporan	Rp 56.581.885,00	10 Laporan	Rp 56.581.885,00	Bidang Statistik dan Aplikasi informatika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			30 Perangkat Daerah	Rp 2.000.000,00	30 Perangkat Daerah	Rp 2.000.000,00	30 Perangkat Daerah	Rp 2.000.000,00	30 Perangkat Daerah	Rp 2.000.000,00	30 Perangkat Daerah	Rp 2.000.000,00	30 Perangkat Daerah	Rp 2.000.000,00	Bidang Statistik dan Aplikasi informatika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.37	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			1 Dokumen	Rp 150.000,00	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	1 dokumen	Rp 150.000,00	Bidang Statistik dan Aplikasi informatika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas			1 Dokumen	Rp 150.000,00	1 dokumen	Rp 265.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1 dokumen	Rp 265.000,00	Bidang Statistik dan Aplikasi informatika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.39	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2.16.03.2.02.41	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai	Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK			4 dokumen	Rp 100.000,00	4 Dokumen	Rp 110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

				Forum Satu Data Daerah	Forum Satu Data Daerah															Putussibau Kota
		2,21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				Rp -	Rp 419.117.000,00		Rp 461.028.700,00		Rp 507.131.570,00		Rp 557.844.727,00		Rp 613.629.199,70		Rp 613.629.199,70		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2,21.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	Predikat KAMI Kabupaten Kapuas Hulu			Rp -	Rp 419.117.000,00		Rp 461.028.700,00		Rp 507.131.570,00		Rp 557.844.727,00		Rp 613.629.199,70		Rp 613.629.199,70		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2,21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Sterilisasi Tempat Strategis (Ruang Kerja Pimpinan)			Rp -	Rp 419.117.000,00		Rp 461.028.700,00		Rp 507.131.570,00		Rp 557.844.727,00		Rp 613.629.199,70		Rp 613.629.199,70		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2,21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			1 Laporan Rp 125.000.000,00		1 Laporan Rp 137.500.000,00		1 Laporan Rp 151.250.000,00		1 Laporan Rp 166.375.000,00		1 Laporan Rp 183.012.500,00		1 Laporan Rp 183.012.500,00	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2,21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			35 Perangkat Daerah Rp 152.579.000,00		35 Perangkat Daerah Rp 167.836.900,00		35 Perangkat Daerah Rp 184.620.590,00		35 Perangkat Daerah Rp 203.082.649,00		35 Perangkat Daerah Rp 223.390.913,90		35 Perangkat Daerah Rp 223.390.913,90	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota
		2,21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			1 Dokumen Rp 141.538.000,00		1 Dokumen Rp 155.691.800,00		1 Dokumen Rp 171.260.980,00		1 Dokumen Rp 188.387.078,00		1 Dokumen Rp 207.225.785,80		1 Dokumen Rp 207.225.785,80	Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota

		2.21.02.2. 01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah		2 Laporan	Rp109.025 .000,00		Rp119.927 .500,00		Rp131.920 .250,00		Rp145.112 .275,00		Rp159.623 .502,50		Rp159.623 .502,50	Bidang Statistik dan Aplikasi informatika	Kab. Kapua s Hulu, Putussi bau Utara, Putussi bau Kota
--	--	-----------------------	---	--	---	--	--------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	---	--